

**STRATEGI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DALAM MENINGKATKAN  
KEPERCAYAAN PUBLIK KEPADA PEMERINTAH DAERAH  
(Studi Di Dinas Kominfo Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat)**

MUHAMMAD TAUFIQURRAKHMAN A. WARIS  
NPP. 29.1950

*Asdaf Provinsi Sulawesi Barat  
Program Studi  
Administrasi Pemerintahan Daerah*

Email:

[mamujuopik@gmail.com](mailto:mamujuopik@gmail.com)

**ABSTRACT**

**Problem Statement/Background (GAP):** *(Contains the background behind the research service principles which include: easy, transparent, and timely are not just a slogan, but actually become a reality. So far, efforts to improve services have been carried out without involving an assessment of the need for repairs beforehand, so that service improvement appears to be in the form of sporadic actions that are usually not in accordance with needs, for that the implementation of community satisfaction surveys as part of an assessment of repair needs is not an issue. need to be done but important. Objective: to find out, analyze and describe the Public Information Disclosure Strategy as measured from aspects of environmental observation, strategy formulation, strategy implementation, and evaluation and control at the Office of Communication, Informatics and Encoding, Mamuju Regency, West Sulawesi Province Methode: This study uses descriptive qualitative research methods with an inductive approach, where the authors obtain data by means of interviews, observation and documentation Result: The performance of the Ministry of Communication and Informatics in public information disclosure in Mamuju Regency is quite optimal. This can be seen from: Environmental observations from the internal side, employee awareness in information disclosure has been categorized as good. This is indicated by the employees at the Communication, Information and Encryption Offices who have disseminated information fairly well and transparently. This good but not optimal service is indicated by the Kominfo Service in realizing its vision and mission always working optimally. The implementation of the Communications and Informatics Service strategy has spread information, including in the blind spot area in Mamuju Regency by using a radio. Evaluation and control, the Communications and Informatics Service has not worked optimally. due to the shortage as it exists at this time. Conclusion: Public information disclosure can be categorized as optimal. This can be seen from clear environmental observations, good strategy formulation and good strategy implementation, as well as good evaluation and control.*

**Keywords:** *Strategy, information, public*

## ABSTRAK

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** (Berisi background yang melatarbelakangi penelitian). prinsip pelayanan yang mencakup: mudah transparan, dan tepat waktu bukan sekedar slogan, melainkan benar-benar menjadi kenyataan. Selama ini upaya perbaikan layanan dilakukan dengan belum melibatkan assessment kebutuhan perbaikan terlebih dahulu, sehingga perbaikan layanan terkesan dalam bentuk tindakan-tindakan sporadic yang biasa saja tidak sesuai dengan kebutuhan, untuk itu pelaksanaan survey kepuasan masyarakat sebagai bagian dari assessment atas kebutuhan perbaikan menjadi hal yang tidak hal perlu dilakukan melainkan hal penting. **Tujuan:** untuk mengetahui, menganalisis dan mendeskripsikan mengenai Strategi Keterbukaan Informasi Publik yang diukur dari aspek pengamatan lingkungan, Formulasi strategi, implementasi strategi, dan evaluasi dan kontrol pada Kantor Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif, dimana penulis memperoleh data dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Kinerja Dinas Kominfo dalam keterbukaan informasi publik di Kabupaten Mamuju sudah cukup optimal. Hal ini dilihat dari: Pengamatan lingkungan dari sisi internal, kesadaran pegawai dalam keterbukaan informasi sudah dikategorikan bagus ini ditandai dengan para pegawai di Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian sudah melakukan penyebaran informasi dengan cukup baik dan transparan Formulasi strategi yang juga dilakukan oleh Dinas Kominfo sudah cukup baik namun belum optimal ini ditandai dengan Dinas Kominfo dalam mewujudkan visi dan misinya selalu bekerja dengan maksimal Implementasi strategi Dinas Kominfo telah menyebarkan informasi termasuk di daerah blind spot yang ada di Kabupaten Mamuju dengan menggunakan pesawat radio. Evaluasi dan kontrol, Dinas Kominfo belum bekerja optimal ini dikarenakan dengan adanya kekurangan seperti yang ada pada saat ini. **Kesimpulan:** keterbukaan informasi publik bisa dikategorikan sudah optimal. Hal ini dilihat dari pengamatan lingkungan yang jelas, formulasi strategi yang baik dan implementasi strategi yang sudah bagus, serta evaluasi dan kontrol yang sudah baik, Namun masih kekurangan alat/ sarana dalam melakukan pelayanan serta SDM yang kurang mumpuni.

**Kata kunci:** *Strategi, Informasi, Publik*





## I. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Indonesia mempunyai kondisi geografis yang memiliki berbagai pulau, sehingga terkadang membawa dampak adanya ketidakseimbangan informasi di masyarakat. Saat ini informasi merupakan kebutuhan bagi setiap orang, disamping kebutuhan akan sandang, papan dan pangan. Terjadinya . Informasi publik dikarenakan oleh adanya komunikasi antara manusia satu dengan manusia yang lainnya, selain itu dengan keterbukaan informasi publik juga dapat mengoptimalkan pengawasan masyarakat kepada penyelenggaraan Negara atau Badan Publik, karena segala sesuatu yang berakibat untuk kepentingan diperlukan pengelolaan penyebaran informasi publik.

Keterbukaan untuk memperoleh informasi semakin hari semakin mengalami desakan yang cukup tinggi sehingga disahkannya Undang- Undang Nomor 14 tahun 2008, Tentang keterbukaan informasi publik (KIP). Menurut Erliana Hasan (2010:118). Karl Deutsch menyebut media massa sebagai “urat nadi pemerintahan” (*the nerverst of government*). Peningkatan pelayanan publik khususnya pelayanan dalam pemberian informasi pengelolaan pemerintahan kepada masyarakat merupakan tugas dan fungsi dari Dinas Kominfosandi sebagai instansi pemerintahan yang mempunyai peran dalam pengelolaan penyediaan layanan komunikasi dan informatika,

Strategi pada dasarnya merupakan perencanaan (planning) dan manajemen dalam mencapai suatu tujuan. Dalam upaya menambah kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, Dinas Kominfo Kabupaten Mamuju telah membuat beberapa strategi dalam penyebarluasan informasi, antara lain dengan cara pengelolaan website yang berperan sebagai media forum. Website milik kominfo Kabupaten Mamuju yang sudah dikelola dari tahun 2017, diharapkan dapat mengumpulkan dan menyebarluaskan informasi aktual terkait seluruh aktivitas dan penyelenggaraan pemerintahan masyarakat dimana website merupakan salah satu fasilitator informasi terhadap masyarakat,yang dapat menjadi pusat informasi, pusat pengumpulan dan penyebaran informasi serta pusat pelancar pelayanan informasi secara mudah dan cepat, akan tetapi pengelolaan website ini masih kurang maksimal, sehingga masyarakat masih minim mendapatkan informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu startegi lain dari Dinas Kominfo Kabupaten Mamuju dalam memberikan peayanan informasi kepada masyarakat adalah

melalui program Kelompok informasi Masyarakat (KIM), pengelolaan layanan opini dan Pengaduan Masyarakat melalui LAPOR SP4N dan Call Center, Mamuju. walaupun sudah sebagai upaya penyebarluasan informasi dilakukan oleh Pemerintah kabupaten Mamuju namun masih banyak masyarakat Kabupaten Mamuju yang mengeluh belum mendapat informasi secara maksimal. ngan adanya kondisi masih minimnya intensitas penyebaran informasi penyelenggaraan pemerintah kepada masyarakat, kurangnya keterbukaan informasi terkait apa yang telah dilakukan oleh pemerintah menyebabkan kebutuhan masyarakat akan informasi penyelenggaraan pemerintah menjadi tidak terpenuhi menyebabkan publik kurang paham dan tidak tahu apa yang telah diperbuat pemerintah selama ini untuk masyarakatnya yang berakibat pada kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah menjadi berkurang

Salah satu faktor utama dalam mewujudkan pemerintah bersih (Clean Government) dan pemerintahan yang baik (Good Governance) adalah: partisipasi, transparansi, akuntabilitas, kepastian hukum, dan kesetaraan menjadi hal yang penting dalam pencapaian iklim birokrasi yang sehat. Dalam konteks pembangunan sistem administrasi negara. Dalam konteks ini, prinsip pelayanan yang mencakup: mudah transparan, dan tepat waktu bukan sekedar slogan, melainkan benar-benar menjadi kenyataan. Selama ini upaya perbaikan layanan dilakukan dengan belum melibatkan assessment kebutuhan perbaikan terlebih dahulu, sehingga perbaikan layanan terkesan dalam bentuk tindakan-tindakan sporadic yang biasa saja tidak sesuai dengan kebutuhan, untuk itu pelaksanaan survey kepuasan masyarakat sebagai bagian dari assessment atas kebutuhan perbaikan menjadi hal yang tidak perlu dilakukan melainkan hal penting. Dinamika selera dan preferensi pelanggan dalam hal ini masyarakat selalu berkembang, sehingga perlu upaya-upaya untuk melakukan penyesuaian berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka penyesuaian itu harus ada identifikasi kritis dalam bentuk *feedback* dari pengguna layanan langsung karena pelayanan publik harus ditingkatkan, baik kualitas maupun kuantitasnya. Kualitas dimaksud adalah daya jangkauan layanan. Semua ini membutuhkan keterlibatan semua pihak dalam melakukan perbaikan layanan publik termasuk masyarakat yang berfungsi sebagai penerima layanan. Oleh sebab itu, survey ini juga merupakan opini publik terhadap layanan yang diberikan selama ini. Opini publik dimaksud disusun sampai dengan mendapatkan indeks kepuasan masyarakat sebagai tolok ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan.

Berdasarkan dari penjelasan informasi yang penulis dapatkan dari pegawai Dinas Kominfo Kabupaten Mamuju serta permasalahan yang terjadi pada lingkup masyarakat, maka



berkaitan dengan yang telah dijelaskan diatas penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“STRATEGI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DALAM MENINGKATKAN KEPERCAYAAN PUBLIK KEPADA PEMERINTAHAN DAERAH (STUDI DI DINAS KOMINFO KABUPATEN MAMUJU PROVINSI SULAWESI BARAT)”**

## **1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)**

Prinsip pelayanan yang mencakup: mudah transparan, dan tepat waktu bukan sekedar slogan, melainkan benar-benar menjadi kenyataan. Selama ini upaya perbaikan layanan dilakukan dengan belum melibatkan assessment kebutuhan perbaikan terlebih dahulu, sehingga perbaikan layanan terkesan dalam bentuk tindakan-tindakan sporadic yang biasa saja tidak sesuai dengan kebutuhan, untuk itu pelaksanaan survey kepuasan masyarakat sebagai bagian dari assessment atas kebutuhan perbaikan menjadi hal yang tidak perlu dilakukan melainkan hal penting.

## **1.3 Penelitian Terdahulu**

Pertama, Lukman Syafiq, Imam Surya, Anwar Aldyus, (2018) , berjudul “Strategi Dinas komunikasi dan Informasi Provinsi Kalimantan Timur Dalam keterbukaan informasi publik di Provinsi Kalimantan Timur ”. Menggunakan metode kualitatif deskriptif. Adapun hasil penelitiannya yakni Menurut hasil penelitian yakni Dinas Komunikasi Dan Informasi Provinsi Kalimantan Timur mempunyai posisi yang sangat strategis untuk mendukung perkembangan memperoleh keunggulan strategi, strategi Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Kalimantan Timur terletak pada kuadrat I, artinya pada posisi ini keterbukaan informasi publik pada Dinas Komunikasi dan Informasi sangat mendukung dilakukan untuk strategi pertumbuhan agresif untuk mendapatkan keunggulan di Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Kalimantan Timur agar dapat bersaing dengan SKPD lain dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik.

Kedua, Risda Wulandari (2018) dari , berjudul “Peran Dindukcapil Dalam Mengurus Keterlambatan Pengurusan Akte Kelahiran di kecamatan Kundur Kabupaten Karimun” .Menggunakan metode kualitatif deskriptif. Adapun hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Pihak Diskominfo menggunakan berbagai macam strategi, yang pertama bekerja sama dengan berbagai macam media cetak dan media online, kedua penyebaran informasi dalam bentuk videotron yang ada dalam bentuk videografis, fotografis dan lain-lain. Sedangkan kendala yang

dialami Diskominfo yaitu kurangnya tenaga kerja yang ahli dalam bidang informasi dan komunikasi publik.

#### **1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu. Penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan keadaan yang baharu serta informan yang lebih luas. GAP penelitian juga hanya ada dan merupakan masalah khusus yang terjadi diLokus Penulis.

#### **1.5 Tujuan**

Dalam pelaksanaannya penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Guna mengetahui strategi dinas Kominfo dalam keterbukaan informasi publik dalam meningkatkan kepercayaan publik kepada pemerintahan daerah (studi di Dinas Kominfo Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat).
2. Guna mengetahui faktor penghambat Dinas Kominfo dalam keterbukaan informasi publik dalam meningkatkan kepercayaan publik kepada pemerintahan daerah (studi di Dinas Kominfo Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat).
3. Guna mengetahui upaya Dinas Kominfo Kabupaten Mamuju dalam keterbukaan informasi publik dalam meningkatkan kepercayaan publik kepada pemerintahan daerah (studi di Dinas Kominfo Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat).

## **II. METODE**

Peneliti dalam penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif sebab peneliti fokus dalam menggambarkan peristiwa yang terjadi dilapangan secara sistematis, logis, objektif dan benar-benar terjadi, agar dapat dipahami setiap fakta yang terjadi guna mendapatkan kesimpulan atas permasalahan yang terjadi.

Menurut sugiyono (2014:137) pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai seting, berbagai sumber, dan berbagai cara. Apabila dilihat dari setingnya, data dapat dikumpulkan pada seting alamiah (*natural setting*), pada laboratorium dengan metode eksperimen, disekolah dengan tenaga pendidik dan kependidikan, dirumah dengan berbagai responden, pada suatu seminar, diskusi, dijalan dan lain-lain". Berdasarkan data tersebut, tentunya data yang diperoleh haruslah



sesuai dengan fakta sehingga dapat menjadi referensi yang akan menimbulkan beberapa klasifikasi data.

Sugiyono (2014:62) mengemukakan bahwa, “setiap peneliti harus dapat menyajikan data yang diperoleh melalui observasi, wawancara kuesioner (angket) atau dokumen”. Prinsip dasar penyajian data adalah komunikasi dan kelengkapan, dalam artian data yang disajikan dapat menarik perhatian pihak lain untuk membacanya dan dengan mudah memahami isinya. Data yang diperoleh berupa data kuantitatif dari skor jawaban masyarakat dan data kualitatif dari jawaban wawancara.

### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1 Strategi Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Mamuju Pelaksanaan Peranan Dinas Dukcapil dalam Percepatan Penerbitan Akta Kelahiran**

##### **A. Pengamatan Lingkungan**

Sebagaimana yang telah di uraikan yang dimaksud dengan pengamatan lingkungan itu sendiri adalah pemantauan, pengevaluasian dan penyebaran informasi dari lingkungan eksternal kepada orang-orang kunci dalam perusahaan. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Mamuju melakukan pengamatan lingkungan internal pada perilaku dan kesadaran pegawai dalam keterbukaan informasi public.

dalam melakukan penyebaran informasi publik pegawai di Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian sudah memiliki kesadaran yang baik meskipun di balik itu semua masih adanya kekurangan yang harus dihadapi oleh para pegawai. Di dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik kepada masyarakat, tentunya ada respon dari masyarakat yang didapatkan oleh pelaksana keterbukaan informasi publik yaitu Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian itu sendiri. respon yang diberikan masyarakat kepada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Mamuju sangat bagus dan antusias, karena sejauh ini belum ada masyarakat yang complain terhadap proses keterbukaan informasi yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Mamuju. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Mamuju sudah melakukan keterbukaan informasi yang baik, termasuk transparansinya dalam keterbukaan informasi publik, dan seiring kecanggihan teknologi yang ada pada saat ini masyarakat jadi lebih mudah dalam mendapatkan informasi tentang pemerintahan.

Dalam melakukan pelayanan khususnya dalam pelayanan keterbukaan informasi publik sudah cukup baik, hal ini didukung oleh wawancara atau diskusi yang telah dilakukan oleh peneliti.

## **B. Formulasi Strategi**

Sebagaimana yang telah diuraikan perumusan strategi sendiri berarti proses mengkaji dan menilai visi dan misi organisasi kemudian merumuskan strategi yang sesuai. dalam formulasi strategi untuk mewujudkan visi dan misi Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Mamuju sudah sejak lama ada rancangannya meskipun dengan adanya kekurangan dan kelebihan yang ada akan tetapi dengan itu semua formulasi strategi tersebut sudah berjalan dengan dukungan dari sdm yang ada di Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian. kebijakan untuk keterbukaan informasi publik berpegang kepada Undang- undang Nomor 14 tahun 2008 dan di implementasikan dengan membuka layanan pengaduan kepada masyarakat, dan dengan adanya surat keputusan khusus yang dikeluarkan Bupati Mamuju tentang desiminasi informasi maka Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Mamuju membentuk tim untuk melayani masyarakat khususnya pada layanan pengaduan. Dalam mencapai tujuan organisasi tentunya memiliki formulasi strategi agar bisa mencapai tujuan dari organisasi tersebut dengan baik.

## **C. Implementasi Strategi**

Dalam definisinya implementasi strategi berarti sebuah kegiatan dan proses dimana beberapa strategi diubah menjadi kebijakan melalui pengembangan program. Setelah melakukan formulasi strategi maka langkah selanjutnya adalah mengimplementasikan formulasi strategi tersebut, dalam melaksanakan implementasi strategi organisasi harus mengimplemntasikan formulasi strategi dengan baik dan benar sesuai prosedur yang telah di tetapkan dari organisasi tersebut, ini dilakukan agar tujuan dari sebuah organisasi bisa mencapai tujuannya dengan baik. Strategi pada dasarnya merupakan perencanaan (pianning) dan manajemen dalam mencapai suatu tujuan. Dalam upaya menambah kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, Dinas Kominfo Kabupaten Mamuju telah membuat beberapa strategi dalam penyebarluasan informasi, antara lain dengan cara pengelolaan website yang berperan sebagai media forum.

Program yang dilakukan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Mamuju dalam melakukan keterbukaan informasi publik di daerah terpencil terutama di daerah yang blind spot atau daerah yang tidak tersentuh jaringan handphone ataupun internet menggunakan sebuah radio pesawat yang bentuknya seperti radio antar penduduk atau yang biasa



disebut handie talkie yang langsung terhubung kepada masyarakat yang ada di daerah terpencil tersebut dan itu sendiri merupakan implementasi strategi bagi daerah terpencil yang ada di Kabupaten Mamuju sendiri, sedangkan untuk daerah yang mempunyai akses internet atau akses handphone sejauh ini cara yang paling efektif untuk meyebarkan informasi kepada public adalah dengan cara mengupload di media sosial milik Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Mamuju maupun web resmi yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Mamuju yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Mamuju yaitu <http://mamujukab.go.id>.

Anggaran di Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Mamuju masih sangat minim karena tidak seperti daerah yang lain yang memungut retribusi pada menara telekomunikasi. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Mamuju sudah mengajukan rancangan peraturan daerah mengenai retribusi untuk menara telekomunikasi dan sudah disahkan pada tahun ini dan diharapkan bisa efektif, sehingga APBD meningkat dan bisa lebih optimal lagi dalam menjalankan program-program dari Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Mamuju terutama dalam keterbukaan informasi public. Pengelolaan informasi publik dapat mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan dengan tetap menjaga prinsip kehati-hatian.

Dalam kelangsungan berjalannya pemerintahan, oleh karena itu Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian mempunyai prosedur pegawai dalam mengelola informasi publik sehingga dapat bekerja sesuai dengan sasaran dan tidak menyalahi aturan yang ada. Prosedur pegawai dalam mengelola informasi dibuat sesuai dengan peraturan yang ada sehingga pegawai bisa mengelola informasi public dan rahasia Negara, prosedur ini dibuat agar tujuan bisa dicapai dengan efisien dan efektif. Strategi pada dasarnya merupakan perencanaan (pianning) dan manajemen dalam mencapai suatu tujuan. Dalam upaya menambah kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Mamuju telah membuat strategi dalam penyebarluasan informasi, ini di dukung oleh hasil diskusi yang peneliti telah lakukan. Strategi Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Mamuju diharapkan bisa meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang informasi-informasi pemerintahan.

#### **D. Evaluasi dan Kontrol**

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya evaluasi dan control merupakan proses kegiatan menganalisis kinerja suatu organisasi serta membuktikan kejadian yang terjadi pada

organisasi sesuai dengan apa yang ada dan dapat dipertanggungjawabkan. evaluasi pegawai dalam keterbukaan informasi public selalu berkembang baik, sejauh ini belum ada keluhan terkait sifat arogansi pegawai dalam menyampaikan informasi, dan diambil kesimpulan dari evaluasi tersebut,

pegawai yang ditempatkan pada pengelolaan keterbukaan informasi public sudah bekerja dengan baik dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dan informasi sudah tersampaikan kepada masyarakat. pengetahuan masyarakat terkait informasi pemerintahan mengalami peningkatan, dengan cara memanfaatkan teknologi mencari informasi bisa lebih mudah, masyarakat berharap agar keterbukaan informasi bisa lebih ditingkatkan. hasil kinerja yang dicapai dari Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Mamuju sudah bagus meskipun belum meningkat secara signifikan, pegawai juga semakin sadar akan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pelaksana keterbukaan informasi public, Seiring dengan wawancara diatas kita bisa menyimpulkan control keterbukaan informasi sudah berjalan baik termasuk juga prosedur sampai dengan penyampaian informasinya dan jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, tahun ini pelaksanaannya jauh lebih baik.

Evaluasi dan control bertujuan sebagai tolak ukur untuk menilai sejauh mana organisasi telah efektif dalam mengimplementasikan rencana strategisnya dalam upaya untuk mencapai visi dan misi organisasi. Evaluasi dan control yang dilakukan kepada para pegawai menurut peneliti sudah baik ini didukung dengan wawancara yang telah peneliti lakukan pada pegawai dan pejabat yang ada di Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian.

### **3.2 Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Ella Novita Sari (2016) , berjudul “Analisis Penerbitan Akta Kelahiran di Dinas Dukcapil Kota Bengkulu”. Adapun temuan hasil penelitiannya yakni Menurut hasil penelitian, ada beberapa saran: Pelayanan penerbitan akta kelahiran harus disesuaikan dengan standar peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga bisa terus meningkatkan kualitas pelayanan penerbitan akta kelahiran ;Peningkatan sumber daya manusia dan sarpras terutama pada bidang pelayanan dan ;operator penebitan akta kelahiran.;Perlu diselenggarakan lagi sosialisasi tentang Permendagri tersebut sehingga pengetahuan mengenai penerbitan akta kelahiran diketahui serta dimengerti oleh semua elemen masyarakat. Gunawan Putra Pamungkas (2017) dari , berjudul “Peran Dindukcapil Dalam Mengurus Keterlambatan Pengurusan Akte Kelahiran di kecamatan Kundur Kabupaten Karimun” . Adapun temuan hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Dinas Dukcapil belum bisa



memecahkan permasalahan yang terjadi di lingkungan masyarakat. Karena dari hasil penelitian yang dilakukan masih ada masyarakat yang belum memahami fungsi dan manfaat dari akta kelahiran.

Iwan Suseno Hutagalung (2019) yang berjudul “Peran Dinas Dukcapil Sipil Dalam Menerbitkan Data Kependudukan (Studi di Kab/ Tanapuli Utara)”. Adapun temuan Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pelaksanaan penerbitan data kependudukan di Dinas Dukcapil Kab. Tanapuli Utara dilaksanakan sesuai dengan prosedur/aturan. Siti Afrida (2017) yang berjudul “Efektivitas Pelayanan Adminduk dalam Rangka Pembuatan Akta Kelahiran di Kantor Dinas Dukcapil Kab. Asahan”. Adapun temuan Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Prosedur Pelayanan di Dinas Dukcapil Kab. Asahan belum bisa dikatakan baik, karena masih adanya masyarakat yang belum memahami tentang prosedur pembuatan akta kelahiran.

Musabry (2020) yang berjudul “Inovasi Pelayanan Pembuatan Akta Kelahiran di Dinas Dukcapil Kota Makassar”. Adapun temuan Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Inovasi pelayanan pembuatan akta kelahiran di kantor Dukcapil Kota Makassar sudah sangat bagus dan berorientasi langsung pada sasaran..

Pembaharuan penelitian ini dari penelitian sebelumnya yakni keterbukaan informasi publik bisa dikategorikan sudah optimal. Hal ini dilihat dari pengamatan lingkungan yang jelas, formulasi strategi yang baik dan implementasi strategi yang sudah bagus, serta evaluasi dan kontrol yang sudah baik, Namun masih kekurangan alat/ sarana dalam melakukan pelayanan serta SDM yang kurang mumpuni.

#### **IV. KESIMPULAN**

Berdasarkan dari hasil pembahasan yang telah diuraikan, maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa strategi keterbukaan informasi public dalam meningkatkan kepercayaan publik kepada pemerintah daerah di Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Mamuju yang sudah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, yaitu:

1. Kinerja Dinas Kominfo dalam keterbukaan informasi publik di Kabupaten Mamuju sudah cukup optimal. Hal ini dilihat dari:
  - a. Pengamatan lingkungan dari sisi internal, kesadaran pegawai dalam keterbukaan informasi sudah dikategorikan bagus ini ditandai dengan para pegawai di Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian sudah melakukan penyebaran informasi

dengan cukup baik dan transparan dan pada sisi eksternal masyarakat juga sudah bisa mengetahui informasi-informasi tentang pemerintahan terutama melalui internet.

- b. Formulasi strategi yang juga dilakukan oleh Dinas Kominfo sudah cukup baik namun belum optimal ini ditandai dengan Dinas Kominfo dalam mewujudkan visi dan misinya selalu bekerja dengan maksimal meskipun disamping itu masih adanya kekurangan, di Kabupaten Mamuju masih adanya Lurah yang belum mengetahui layanan mengenai pengaduan publik dan juga kekurangan SDM dalam mensosialisasikannya. Dalam membuat kebijakan selalu berpegang kepada Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
  - c. Implementasi strategi Dinas Kominfo telah menyebarkan informasi termasuk di daerah blind spot yang ada di Kabupaten Mamuju dengan menggunakan pesawat radio, untuk mengenai anggaran yang kurang Dinas Kominfo telah mengajukan rancangan peraturan daerah mengenai retribusi menara telekomunikasi dan standar prosedur dalam mengelola informasi sudah sesuai dengan peraturan yang ada.
  - d. Evaluasi dan kontrol, Dinas Kominfo belum bekerja optimal ini dikarenakan dengan adanya kekurangan seperti yang ada pada saat ini yaitu pandemi covid-19 sehingga pegawai Dinas Kominfo belum bisa optimal dalam terjun langsung kepada masyarakat dalam menyebarluaskan informasi. Masyarakat juga berpendapat bahwa masih minimnya penyebaran informasi publik yang ada di Kabupaten Mamuju yang dikarenakan pegawai di Dinas Kominfo masih sangat sedikit.
2. Terdapat beberapa faktor yang menjadi penghambat Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian dalam keterbukaan informasi public di Kabupaten Mamuju, adapun faktor penghambatnya yaitu:
- a. Masih terbatasnya anggaran dalam keterbukaan informasi public dikarenakan anggaran banyak dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur di Kabupaten Mamuju yang terkena dampak gempa pada tahun 2021 lalu.
  - b. Masih terbatasnya sumber daya manusia yang melakukan keterbukaan informasi public ini ditandai dengan masih banyak pegawai Kominfo yang belum mengerti betul dalam pengelolaan web dan sosial media milik Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian.



- c. Masih terbatasnya fasilitas dalam melaksanakan keterbukaan informasi public, kekurangan komputer dan jaringan untuk mengakses internet di Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian.
  - d. Masih adanya pengaruh budaya masyarakat yang kental di daerah terpencil di Kabupaten Mamuju sehingga dalam menerima keterbukaan informasi public sulit.
  - e. Masih adanya pengaruh kondisi sosial masyarakat dalam menerima keterbukaan informasi publik salah satunya budaya baca yang belum terbiasa pada masyarakat.
  - f. Masih adanya pengaruh politik daerah kepada masyarakat dalam keterbukaan informasi public ini terjadi apabila ada pergantian pimpinan di wilayah Kabupaten Mamuju
3. Terdapat upaya yang telah dilakukan dan yang akan dilakukan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Mamuju dalam Keterbukaan informasi public untuk mengatasi hambatan yaitu:
- a. Melakukan penambahan anggaran dengan cara mengajukan rancangan peraturan daerah untuk memungut biaya retribusi untuk menara telekomunikasi.
  - b. Melakukan peningkatan sumber daya manusia dengan cara memberikan pelatihan kepada pegawai di Dinas Kominfo tentang pengelolaan web dan sosial media.
  - c. Memaksimalkan fasilitas yang ada dengan cara menyuruh pegawai untuk membawa laptop sendiri dari rumah dan menggunakan jaringan kuotanya sendiri.
  - d. Memperbaiki kondisi budaya dengan cara sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya untuk mengetahui informasi tentang kebijakan yang ada dipemerintahan.
  - e. Memperbaiki kondisi sosial yang ada pada masyarakat dengan menghimbau masyarakat agar terbiasa dengan informasi yang diberikan oleh pemerintah dan bisa membaca kemana arah kebijakan dan mengikutinya sesuai dengan aturan yang ada.
  - f. Memperbaiki kondisi politik yang ada di daerah dengan cara sosialisasi kepada masyarakat untuk tidak membeda-bedakan pimpinan dan bisa menerima aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah.

**Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada satu kelurahan saja sebagai model studi kasus yang dipilih berdasarkan pendapat Duncan yang dikutip Whellen dan Hunge saja.

**Arah Masa Depan Penelitian (*future work*).** Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan Strategi Keterbukaan Informasi Publik Dalam Meningkatkan Kepercayaan Publik Kepada Pemerintah Daerah Di Dinas Kominfo Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat untuk Menemukan Hasil Yang Lebih Mendalam.

## **V. UCAPAN TERIMA KASIH**

Penulis mengucapkan terimakasih serta penghargaan sebesar-besarnya kepada Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat serta jajaran, seluruh dosen pengajar, pembimbing dan penguji juga seluruh pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini.

## **VI. DAFTAR PUSTAKA**

- Dearlove, C. *Strategic Human Resource Management*. new york: sage publication, 2003.
- Dearlove, crainer and. *Strategic Human Resource Management*. new york: sage publication, 2003.
- Dwiyanto. *Mengembalikan Kepercayaan Publik Melalui Reformasi Birokrasi*. jakarta: gramedia, 2011.
- Effendy, Khasan. *Memadukan Metode Kuantitatif Dan Kualitatif*. bandung: cv. indra prahasta, 2014.
- Hartono. *Sistem Informasi Manajemen Berbasis Komputer*. jakarta: rineka cipta, 2013.
- Hidayat. *Definisi Sistem*. tangerang: jurnal cyber raharja, 2009.
- Kaelan. *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*. yogyakarta: paradigma, 2005.
- Mardiyanta. *Restore Public Trust Through Deliberative Public Policy*, 2013.